

Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Publik dalam Keuangan Sosial Islam: Bukti Empiris dari Lembaga Zakat di Indonesia

Transparency, Accountability, and Public Trust in Islamic Social Finance: Empirical Evidence from Zakat Institutions in Indonesia

Bahtiar Effendi^{1*}, Fariska Amalia Putri²

^{1,2} Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

Abstract: This study offers a new contribution in the form of an integrative approach between the concept of Good Sharia Business Governance (GSBG) and local institution-based zakat management practices, as well as an empirical emphasis on the relationship between transparency, accountability, and increased public trust. The background of this study is grounded in the importance of good zakat governance to enhance public trust in zakat collection agencies. This study employs a descriptive qualitative approach, utilizing data collection techniques such as observation and in-depth interviews with management and relevant stakeholders. The findings indicate that LAZISMU has implemented GSBG principles—including transparency, accountability, fairness, and participation—in the management of zakat, infak, and sedekah funds. Transparency is manifested through periodic financial reports accessible to the public and the involvement of zakat contributors in program evaluations. Accountability is implemented through clear standard operating procedures (SOPs), internal audits, and clarification mechanisms. Despite facing challenges such as limited human resources and the use of information technology, LAZISMU continues to improve its institutional capacity through training, strategic partnerships, and the development of a professional organizational culture. The conclusion of this study is that the consistent application of GSBG is capable of increasing public trust and the effectiveness of zakat fund management. Researchers recommend strengthening digital systems and enhancing human resource capacity as further strategic steps.

Received: January 20, 2026

Accepted: April 25, 2026

Published: April 29, 2026

To Cite this Article: Effendi, Bahtiar, and Fariska Amalia Putri. "Transparansi, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Publik Dalam Keuangan Sosial Islam: Bukti Empiris Dari Lembaga Zakat Di Indonesia: Transparency, Accountability, and Public Trust in Islamic Social Finance: Empirical Evidence from Zakat Institutions in Indonesia". *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 3 1 (2026):42-56. <https://doi.org/10.70742/suffah.v3i1.686>.



Copyright © 2026 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keywords: Transparency, Accountability, Public Trust, Islamic Social Finance, Sharia Governance

Abstrak: Penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pendekatan integratif antara konsep Good Sharia Business Governance (GSBG) dengan praktik pengelolaan zakat berbasis kelembagaan lokal, serta penekanan pada hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik secara empiris. Latar belakang kajian ini didasari oleh pentingnya tata kelola zakat yang baik guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap pengurus dan stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU telah menerapkan prinsip-prinsip GSBG seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Transparansi diwujudkan dalam bentuk pelaporan keuangan berkala yang dapat diakses publik serta keterlibatan muzakki dalam evaluasi program. Akuntabilitas dilaksanakan melalui SOP yang jelas, audit internal, dan mekanisme klarifikasi. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan SDM dan penggunaan teknologi informasi, LAZISMU terus melakukan perbaikan kelembagaan melalui pelatihan, kerja sama strategis, dan pembentukan budaya organisasi yang profesional. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan GSBG secara konsisten mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana zakat. Peneliti merekomendasikan penguatan sistem digital dan peningkatan kapasitas SDM sebagai langkah strategis lanjutan.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Kepercayaan Publik, Keuangan Sosial Islam, Tata Kelola Syariah

Pendahuluan

Pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, realisasi penghimpunan dana zakat masih belum optimal, salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola lembaga zakat. Dalam konteks ini, penerapan prinsip Good Sharia Business Governance (GSBG) menjadi sangat

penting sebagai kerangka tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan dana umat.¹

Namun demikian, studi empiris yang secara spesifik mengkaji implementasi GSBG pada lembaga amil zakat di tingkat daerah, khususnya pada lembaga berbasis masyarakat seperti LAZISMU, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan Good Corporate Governance (GCG) secara umum, tanpa mengintegrasikannya secara komprehensif dengan prinsip-prinsip syariah dalam konteks pengelolaan zakat. Selain itu, kajian yang menggali secara kualitatif praktik nyata transparansi dan akuntabilitas dalam perspektif GSBG juga masih minim.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan empiris dan metodologis dalam memahami bagaimana implementasi GSBG secara konkret dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, khususnya di tingkat lokal. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip GSBG pada LAZISMU Kabupaten Pekalongan sebagai representasi lembaga filantropi Islam berbasis daerah yang fokusnya adalah mengelola zakat.

Zakat secara Bahasa bermakna berkah, berkembang, dan suci.² Sesuai dengan konsep bahwa zakat adalah “berkah dan berkembang”, maka zakat tidak menjadikan orang yang menunaikannya menjadi lebih miskin atau semakin miskin. Para pemberi zakat, di sisi lain, benar-benar menjadi lebih kaya dan sukses. Karena zakat berarti “membersihkan dan menyucikan,” orang-orang yang secara rutin membayarnya melaporkan merasa lebih tenang karena mereka tidak pelit atau serakah.³

Sejalan dengan hukum Islam, seorang Muslim atau entitas perusahaan yang mampu membayar zakat diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaannya kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pengumpulan zakat di Indonesia

¹ Atsheila Suci Fitriani and Bahtiar Effendi, “Assessing the Implementation of Good Sharia Business Governance in Zakat Management : A Study of BAZNAS in Pekalongan Regency,” *Journal of Theoretical and Applied Philanthropy (JTAP)* 1, no. 1 (2026): 17–24.

² Oni Sahroni et al., *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019).

³ Adnan Murrâh Nasution, “Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305, <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.

seharusnya memiliki potensi yang besar, menurut perkiraan populasi.⁴ Pada kenyataannya, pengumpulan zakat di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan yang dapat dihasilkan. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan peran zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi zakat.⁵

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan ini dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mengelola akuntansi zakat, infaq, shodaqoh dan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Ada 7 prinsip dalam zakat, diantaranya: Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terpadu dan akuntabilitas. Keadilan menjadi fondasi dasar dalam ekonomi syariah,⁶ dan secara keseluruhan 7 asas tersebut sesuai dengan 5 prinsip GCG (Good Corporate Governance) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsivitas, kemandirian, kesetaraan dan pertanggungjawaban.⁷

Dasar sukarela yang digunakan untuk mengumpulkan dana zakat merupakan salah satu keunikan pengelolaan zakat di Indonesia. Banyak LAZ bermunculan di Indonesia dengan diterapkannya UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk mencegah berkembangnya LAZ yang melanggar hukum, BAZNAS di Indonesia harus mengontrol LAZ dan memiliki tanggung jawab. dan pembaruan rutin tentang situasi keuangan Muzaki.⁸ Sebuah institusi harus memiliki sistem yang digunakan sebagai acuan dasar

⁴ Bambang Suprayogi and Abdur Razak, "Implementasi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Umkm Pamokolan Ciamis," *Jurnal Produktif* 3, no. 2 (2019): 254-61.

⁵ Alifiyah, Afifudin, and Umi Nandiroh, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang)," *Warta Ekonomi* 7, no. 1 (2024): 44-58.

⁶ Achmad Tubagus Surur, Hendri Hermawan Adinugraha, and Dliyauddin Achmad, "An Analysis of Sharia Economic Practices in Pekalongan from Habib Luthfi's Perspective," *El-Suffah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2025): 138-70, <https://doi.org/10.70742/suffah.v2i2.430>.

⁷ Taufikur Rahman, "Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz)," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, No. 1 (2015): 141, <https://doi.org/10.18326/Muqtasid.V6i1.141-164>.

⁸ Deni Purnama, "Masyarakat Sipil Dan Pengelolaan Zakat: Reposisi Laz Berdasarkan Uu Nomor 23 Tahun 2011," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2020): 94-116, <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.149>.

dalam mengukur kinerja dan keberhasilan lembaganya. Salah satu sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja institusi tersebut adalah tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengelola dan mengendalikan suatu institusi dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁹

Konsep tata kelola yang baik menekankan pada peran dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola zakat serta dalam menumbuhkan integritas dan kepercayaan masyarakat, seiring dengan perkembangan lembaga pengelola zakat.¹⁰ Lembaga pengelola zakat dapat tampil sebagai lembaga pengelola zakat modern yang profesional dan amanah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan umum lembaga pengelola zakat. Peningkatan profesionalisme merupakan salah satu cara untuk memperkuat posisi lembaga zakat, antara lain melalui penerapan tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik. Semua lembaga keuangan publik harus menerapkan.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem pengelolaan organisasi yang dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional yang mencakup empat prinsip dasar yaitu kesetaraan, transparansi, responsibilitas, dan akuntabilitas.¹¹ Tujuan dari penerapan Good Governance adalah untuk mengarahkan dan mengatur kegiatan organisasi ke arah perbaikan dan pertanggungjawaban sehingga kegiatan pengelolaan organisasi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan regulasi yang ada.¹² Untuk memastikan bahwa zakat yang mereka

⁹ Mochamad Muslih et al., "The Effect of Information Technology Governance and Enterprise Risk Management on the Performance of State-Owned Enterprises in Non-Public Financial Fields Moderated by Corporate Governance," *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (2020): 446–66, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i4.230>.

¹⁰ Riska Kudung Kusnati and Bahtiar Effendi, "Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia," *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 04, no. 01 (2025): 19–33.

¹¹ Rapindo, Mentari Dwi Aristi, and Intan Putri Azhari, "Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau," *Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021): 121–35.

¹² Mohammad Nizarul Alim, "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia : A Review," *Elsevier* 211, no. September (2015): 232–36, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>.

bayarkan (Muzakki) digunakan dan dikelola secara efisien, lembaga zakat harus memiliki tata kelola yang baik sesuai dengan syariah Islam sehingga memberikan kepuasan tersendiri berupa kepercayaan Muzakki.¹³

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu lembaga filantropi Islam yang berperan aktif dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan amanah.¹⁴ Sebagai bagian dari jaringan LAZISMU nasional, lembaga ini mengemban tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Good Sharia Business Governance) guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator utama dalam memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan syariah.

Penelitian mengenai implementasi prinsip *Good Sharia Business Governance* (GSBG) pada LAZISMU Kabupaten Pekalongan menjadi penting dilakukan mengingat peran strategis lembaga amil zakat dalam mengelola dana umat yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga formal, kepercayaan publik menjadi kunci utama yang harus dijaga. Oleh karena itu, penerapan GSBG tidak hanya menjadi tuntutan regulatif, tetapi juga kebutuhan moral dan operasional agar pengelolaan zakat dapat berlangsung secara profesional dan berkelanjutan.¹⁵ Juga karena Pemahaman mendalam mengenai sistem dan praktik akuntabilitas lembaga zakat dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan inefisiensi dalam penyaluran zakat.¹⁶

¹³ Mahmudi Mahmudi and Rizka Luluh Prastmawati, "The Effect of Sharia Governance and Customer Relationship Marketing on Muzakki Loyalty," *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n1.p1-17>.

¹⁴ Bahtiar Effendi and Siti Nariah, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 218–29.

¹⁵ Fitriani and Effendi, "Assessing the Implementation of Good Sharia Business Governance in Zakat Management : A Study of BAZNAS in Pekalongan Regency."

¹⁶ Ram Al et al., "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 508–15, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Melalui analisis deskriptif yang memanfaatkan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alamiah tertentu, serta dengan menggunakan berbagai metode naturalistik, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan pengalaman subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya secara menyeluruh.¹⁷ Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Pekalongan yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 10 Gejlig, Kajen. Pemilihan LAZISMU sebagai objek studi didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan salah satu institusi filantropi Islam yang aktif dan representatif di tingkat daerah, serta memiliki sistem pengelolaan zakat yang relatif terstruktur dan berkembang, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi prinsip GSBG secara empiris.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan yang terlibat.

Berbagai prosedur digunakan dalam pengumpulan data, termasuk observasi dan wawancara, yang keduanya sangat penting untuk memperoleh data yang tepat. Wawancara adalah sebuah diskusi dengan tujuan yang telah ditentukan. Di dalamnya, baik pewawancara (interviewer) maupun narasumber terlibat dalam percakapan ini: pewawancara mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan tanggapan. Observasi merupakan pengamatan dan pengumpulan data pada suatu objek penelitian. Adapun data yang diteliti dalam penelitian ini berupa sistem tata kelola suatu lembaga dengan menerapkan prinsip good corporate governance terutama aspek transparansi

¹⁷ Kurniawan Candra Guzman and Nina Oktarina, "Strategi Komunikasi Eksternal untuk Menunjang Citra Lembaga," *Economic Education Analysis Journal* 4, no. 2 (2023): 301–15, <https://doi.org/10.35334/jbkb.v4i2.3260>.

dan akuntabilitas pada dana zakatnya.¹⁸ Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran konkret mengenai sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan, serta memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola lembaga zakat secara umum, khususnya dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Penerapan Prinsip GSBG di LAZISMU Kabupaten Pekalongan

Penerapan prinsip Good Sharia Business Governance (GSBG) di LAZISMU Kabupaten Pekalongan menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam mewujudkan tata kelola lembaga zakat yang transparan dan akuntabel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip utama seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi telah diimplementasikan melalui struktur organisasi yang jelas, pelaporan keuangan berkala, serta keterbukaan informasi kepada publik. Selain itu, keterlibatan stakeholder, termasuk *muzakki* dan *mustahik*, dalam proses evaluasi program mencerminkan adanya upaya penguatan aspek partisipatif dalam tata kelola lembaga.

Tabel 1. Implementasi Prinsip GSBG di LAZISMU Kabupaten Pekalongan

Prinsip GSBG	Implementasi di LAZISMU	Temuan Penelitian
Transparansi	Laporan keuangan berkala, publikasi program	Akses informasi terbuka bagi publik
Akuntabilitas	SOP, audit internal	Pengelolaan dana lebih terstruktur
Keadilan	Distribusi dana sesuai asnaf	Penyaluran tepat sasaran
Partisipasi	Pelibatan muzakki & mustahik	Meningkatkan kepercayaan publik
Integritas	Budaya amanah dan profesional	Meningkatkan legitimasi lembaga

Sumber: Lazismu Kab. Pekalongan, 2026

Tabel 1. menjelaskan bahwa, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas sebagai indikator utama tata kelola zakat (Nasrizal et al.; Aisyah), temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya dimensi tambahan berupa partisipasi aktif stakeholder sebagai elemen penting dalam implementasi GSBG. Hal ini memperluas kerangka konseptual GSBG yang tidak hanya berfokus pada aspek

¹⁸ Fatimah Purnama Wulansari, "Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat," *ZISWAF ASFA Journal* 2, no. 2 (2024): 181-95.

administratif, tetapi juga pada keterlibatan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, implementasi GSBG di LAZISMU Kabupaten Pekalongan cenderung bersifat lebih inklusif dan kontekstual dibandingkan dengan model normatif yang selama ini dikembangkan dalam literatur.

Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pengurus inti LAZISMU Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa lembaga ini secara aktif mengedepankan transparansi dalam pelaporan dan penyaluran dana. Dalam wawancara dengan salah satu staf LAZISMU Kabupaten Pekalongan, disampaikan bahwa pelaporan dilakukan setiap triwulan dan disampaikan resmi serta forum-forum pertanggungjawaban internal. Dokumentasi berupa laporan keuangan dan program tahunan menunjukkan bahwa LAZISMU secara konsisten melakukan audit internal dan menjalin kerja sama dengan pihak independen untuk meningkatkan kepercayaan publik. Hal ini diperkuat dengan pengakuan dari beberapa mustahik yang menyatakan kepuasan terhadap pelayanan dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh lembaga tersebut.

Penerapan prinsip GSBG dalam konteks lembaga amil zakat, seperti yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Pekalongan, selaras dengan teori tata kelola syariah yang menekankan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan keterbukaan. Prinsip GSBG terdiri dari lima elemen utama,¹⁹ hal itu meliputi: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan, yang semuanya menjadi landasan dalam pengelolaan lembaga berbasis syariah. Sementara itu Dasuki menambahkan bahwa,²⁰ penerapan prinsip ini harus diselaraskan dengan nilai-nilai Islam agar tidak sekadar memenuhi aspek formalitas, tetapi juga mencerminkan esensi pengelolaan zakat yang amanah dan adil. Dalam konteks operasional lembaga zakat, seperti dijelaskan oleh Hasibuan,²¹ penerapan prinsip GSBG akan memperkuat legitimasi dan

¹⁹ Iestyn Kelvianto and Ronny H. Mustamu, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan Usaha pada Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu," *AGORA* 6, no. 1-2 (2018): 1-2.

²⁰ Rima Elya Dasuki, "Manajemen Strategi : Kajian Teori Resource Based View," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2021): 447-54, <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>.

²¹ Indra Mualim Hasibuan, Yenni Samri, and Juliati Nasution, "Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat," *Aktiva: Journal of Accountancy and Management* 2, no. 2 (2024): 118-35.

kepercayaan masyarakat, yang menjadi fondasi keberlanjutan lembaga filantropi Islam.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya penerapan GSBG di lembaga zakat. Penelitian oleh Nasrizal et al,²² menunjukkan bahwa penerapan prinsip GSBG mampu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap LAZ. Studi dari dalam *Jurnal Al-Muzara'ah* mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek dominan yang memengaruhi kepuasan muzakki. Penelitian lain oleh Aisyah²³ juga menyatakan bahwa penerapan GSBG berdampak langsung terhadap efektivitas penyaluran zakat. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kiryanto dan Khasanah²⁴ menunjukkan bahwa tata kelola lembaga amal zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi muzakki dalam membayar zakat. Hasil studi ini menegaskan bahwa persepsi positif terhadap tata kelola yang profesional dan transparan dapat menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan dari para muzakki, sehingga mereka terdorong untuk menunaikan kewajibannya melalui lembaga resmi.

Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas yang Dilakukan LAZISMU

LAZISMU Kabupaten Pekalongan menunjukkan bentuk nyata transparansi dan akuntabilitas melalui berbagai mekanisme pelaporan, keterbukaan informasi, serta sistem pengawasan internal yang terstruktur. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa lembaga ini secara konsisten menyediakan laporan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dapat diakses publik melalui berbagai kanal, seperti media sosial, brosur, dan laporan tahunan. Selain itu, LAZISMU juga menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana, yang menjadi dasar dalam

²² Nasrizal et al., "Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh," *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning* 4, no. 2 (2022): 7-15.

²³ Decka Aisyah, Elyanti Rosmanidar, and Sri Rahma, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Baznas Kota Jambi," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (2022): 351-60, <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1031>.

²⁴ Kiryanto Kiryanto and Villia Nikmatul Khasanah, "Analisis Karakteristik Muzakki Dan Tata Kelola Laz Terhadap Motivasi Membayar Zakat Penghasilan," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 2, no. 1 (2016): 51, <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.51-64>.

menilai akuntabilitas pengelolaan dana umat.²⁵ Transparansi juga tercermin dari pelibatan muzakki dalam laporan pertanggungjawaban publik secara periodik, yang disampaikan melalui forum-forum resmi.

Upaya dalam memahami bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Pekalongan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak internal lembaga. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa transparansi menjadi salah satu prinsip utama yang dijaga dengan ketat oleh LAZISMU dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Transparansi ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan berkala yang dapat diakses oleh publik. Setiap donatur maupun masyarakat umum dapat meminta laporan penggunaan dana kapan saja, dan LAZISMU tidak menutup akses terhadap data-data yang relevan selama sesuai dengan ketentuan privasi lembaga.

Transparansi bentuk lain yang dilakukan adalah publikasi program dan hasil penghimpunan serta penyaluran dana secara rutin melalui media sosial, website resmi. Berdasarkan penuturan informan dari divisi pelaporan, LAZISMU Kabupaten Pekalongan secara konsisten memperbarui informasi program yang sedang berjalan maupun telah selesai dilaksanakan. Selain itu, lembaga ini juga mengundang partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pendistribusian, misalnya dalam kegiatan penyaluran zakat fitrah dan santunan kepada dhuafa. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menyaksikan langsung bagaimana proses penggunaan dana yang telah mereka titipkan, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi aktif.²⁶

Akuntabilitas sosial diwujudkan dengan cara LAZISMU juga menyediakan forum komunikasi terbuka antara pengelola dan muzaki, baik dalam bentuk forum diskusi, temu donatur, maupun melalui layanan pengaduan dan saran. Berdasarkan wawancara dengan staf pelayanan donatur, disebutkan bahwa lembaga ini merespons dengan cepat setiap pertanyaan maupun keluhan dari para pemberi dana. Mereka juga memiliki mekanisme klarifikasi apabila ditemukan perbedaan informasi atau kesalahpahaman

²⁵ Taut, "Kejar Target Penghimpunan Dan Tingkatkan Kualitas Layanan Di Semarang, Lazismu Gelar Rakorda," Lazismu, 2025.

²⁶ Irwan Halawa and Hasnun Jauhari Ritonga, "Manajemen Pelayanan Donasi Online Di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 22 (2025): 1-16, <https://doi.org/10.36406/jam.v22i1.67>.

mengenai penyaluran dana. Semua upaya ini merupakan bagian dari komitmen LAZISMU untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta membangun budaya organisasi yang akuntabel dan amanah dalam mengelola dana umat.

Kendala dan Upaya Perbaikan dalam Penerapan GSBG

Proses penerapan prinsip GSBG (Good Governance dalam Pengelolaan Zakat), LAZISMU Kabupaten Pekalongan menghadapi sejumlah kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu kendala utama yang diungkapkan oleh narasumber adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa staf yang mengelola administrasi, pelaporan, dan distribusi zakat masih menjalankan tugas secara rangkap, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas kerja. Selain itu, belum semua amil memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang manajemen zakat dan keuangan syariah, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas pengambilan keputusan dan pelaporan. Kendala ini sering kali menghambat optimalisasi prinsip profesionalisme dan efektivitas dalam GSBG.

Sementara itu, aspek teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. LAZISMU masih terus berproses dalam mengembangkan sistem pelaporan dan manajemen data berbasis digital secara menyeluruh. Menurut hasil wawancara, beberapa program pelaporan masih dilakukan secara manual atau semi-digital, yang menimbulkan potensi keterlambatan dalam menyusun laporan berkala. Selain itu, belum semua donatur dan mustahik terbiasa menggunakan sistem digital yang disediakan oleh lembaga, sehingga komunikasi dan pelaporan secara real-time belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini turut memengaruhi aspek transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan dalam prinsip GSBG.²⁷

Demikian, LAZISMU Kabupaten Pekalongan telah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS, Forum Zakat (FOZ), maupun lembaga pelatihan swasta lainnya. Dalam wawancara, pihak pengelola

²⁷ Nia Lovenia and Muhammad Akhyar Adnan, "Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta)," *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2017): 57-67, <https://doi.org/10.18196/rab.010106>.

menyatakan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan prioritas utama yang sedang mereka kejar secara bertahap. Selain itu, mereka juga mulai membangun kerja sama dengan kampus-kampus lokal dan komunitas digital guna memperkuat sistem informasi dan memperluas jaringan relawan yang memiliki kompetensi teknologi dan administrasi zakat.

Upaya lain yang terus didorong adalah penguatan budaya organisasi berbasis nilai-nilai amanah dan profesionalisme. Hal ini diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci, evaluasi rutin terhadap program kerja, serta pembentukan tim audit internal yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan program sesuai dengan prinsip-prinsip GSBG. LAZISMU juga berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan muzaki dengan menyelenggarakan forum evaluasi dan diskusi publik yang melibatkan berbagai pihak. Meski tantangan masih ada, komitmen lembaga dalam memperbaiki sistem dan menjalankan tata kelola zakat yang baik menunjukkan bahwa mereka terus bergerak menuju penguatan kelembagaan yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi prinsip Good Sharia Business Governance (GSBG) di LAZISMU Kabupaten Pekalongan telah berjalan secara relatif optimal, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui pelaporan keuangan berkala, audit internal, serta keterbukaan informasi publik. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif *muzakki* dalam evaluasi program menjadi faktor penting dalam memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep GSBG dengan menambahkan dimensi partisipatif sebagai elemen penting dalam tata kelola lembaga zakat berbasis syariah. Temuan ini memperluas kerangka GSBG yang sebelumnya lebih menekankan aspek administratif seperti transparansi dan akuntabilitas, menjadi lebih kontekstual dengan memasukkan aspek keterlibatan stakeholder sebagai faktor kunci dalam meningkatkan legitimasi lembaga.

Dari sisi implikasi kebijakan, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan sistem tata kelola zakat berbasis digital serta peningkatan kapasitas

sumber daya manusia di lembaga zakat, khususnya di tingkat daerah. Selain itu, diperlukan standarisasi sistem pelaporan dan pengawasan yang terintegrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas berjalan secara konsisten di seluruh lembaga amil zakat.

Adapun untuk agenda riset ke depan, penelitian ini membuka peluang untuk dilakukan studi komparatif antar lembaga zakat di berbagai daerah guna menguji konsistensi model GSBG yang dihasilkan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh implementasi GSBG terhadap tingkat kepercayaan publik secara lebih luas, serta mengembangkan model integratif antara tata kelola syariah dan transformasi digital dalam pengelolaan zakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia, atas dukungan institusi dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik dalam bentuk masukan, penelaahan (proofreading), maupun dukungan lainnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Pernyataan Kontribusi Penulis

BE dan FP berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, metodologi, pengumpulan data, analisis, serta penulisan dan revisi naskah. Kedua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Pernyataan Penggunaan AI

Penulis menyatakan bahwa penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam penelitian ini hanya terbatas pada fungsi pendukung seperti penyuntingan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta peningkatan kejelasan dan keterbacaan. AI tidak digunakan untuk menghasilkan ide utama, melakukan analisis data, atau menarik kesimpulan ilmiah. Penulis bertanggung jawab penuh atas orisinalitas, keakuratan, dan integritas akademik dari isi artikel ini.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Decka, Elyanti Rosmanidar, and Sri Rahma. "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Baznas Kota Jambi." *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 3 (2022): 351-60. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1031>.
- Al, Ram, Jaffri Saad, Norazita Marina, Abdul Aziz, and Norfaiezah Sawandi. "Islamic Accountability Framework in the Zakat Funds Management." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 164, no. August (2014): 508-15. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.139>.
- Alifiyah, Afifudin, and Umi Nandiroh. "ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD AMIL GOVERNANCE BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLE DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang)." *Warta Ekonomi* 7, no. 1 (2024): 44-58.
- Alim, Mohammad Nizarul. "Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purposes in Indonesia : A Review." *Elsevier* 211, no. September (2015): 232-36. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.028>.
- Effendi, Bahtiar, and Siti Nariah. "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 6, no. 2 (2023): 218-29.
- Elya Dasuki, Rima. "Manajemen Strategi : Kajian Teori Resource Based View." *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* 12, no. 3 (2021): 447-54. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v12i3.710>.
- Fitriani, Atsheila Suci, and Bahtiar Effendi. "Assessing the Implementation of Good Sharia Business Governance in Zakat Management : A Study of BAZNAS in Pekalongan Regency." *Journal of Theoretical and Applied Philanthropy (JTAP)* 1, no. 1 (2026): 17-24.
- Guzman, Kurniawan Candra, and Nina Oktarina. "STRATEGI KOMUNIKASI EKSTERNAL UNTUK MENUNJANG CITRA LEMBAGA." *Economic Education Analysis Journal* 4, no. 2 (2023): 301-15. <https://doi.org/10.35334/jbkb.v4i2.3260>.
- Halawa, Irwan, and Hasnun Jauhari Ritonga. "Manajemen Pelayanan Donasi Online Di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 22 (2025): 1-16. <https://doi.org/10.36406/jam.v22i1.67>.
- Hasibuan, Indra Mualim, Yenni Samri, and Juliati Nasution. "Konsep Good

- Governance Lembaga Pengelola Zakat.” *Aktiva: Journal of Accountancy and Management* 2, no. 2 (2024): 118–35.
- Kelvianto, Iestyn, and Ronny H. Mustamu. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK KEBERLANJUTAN USAHA PADA PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG MANUFAKTUR PENGOLAHAN KAYU.” *AGORA* 6, no. 1-2 (2018): 1-2.
- Kiryanto, Kiryanto, and Villia Nikmatul Khasanah. “Analisis Karakteristik Muzakki Dan Tata Kelola Laz Terhadap Motivasi Membayar Zakat Penghasilan.” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 2, no. 1 (2016): 51. <https://doi.org/10.30659/jai.2.1.51-64>.
- Kusnati, Riska Kudung, and Bahtiar Effendi. “Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia.” *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics* 04, no. 01 (2025): 19–33.
- Lovenia, Nia, and Muhammad Akhyar Adnan. “Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta).” *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1, no. 1 (2017): 57–67. <https://doi.org/10.18196/rab.010106>.
- Mahmudi, Mahmudi, and Rizka Luluh Prastmawati. “The Effect of Sharia Governance and Customer Relationship Marketing on Muzakki Loyalty.” *AKRUAL: Jurnal Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v12n1.p1-17>.
- Muslih, Mochamad, Iis Sugianti, Daulat Freddy Simanjuntak, and Dedi Rianto Rahadi. “The Effect of Information Technology Governance and Enterprise Risk Management on the Performance of State-Owned Enterprises in Non-Public Financial Fields Moderated by Corporate Governance.” *International Journal of Science and Society* 2, no. 4 (2020): 446–66. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v2i4.230>.
- Nasrizal, Sinta Westika Putri, Eva Suryany, F Yasmeardi, and Maiyulnita. “Implementasi Prinsip Good Amil Governance Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Payakumbuh.” *Jurnal Public Administration, Business and Rural Development Planning* 4, no. 2 (2022): 7–15.
- Nasution, Adnan Murrah. “Pengelolaan Zakat Di Indonesia.” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* 1, no. 2 (2020): 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.
- Purnama, Deni. “Masyarakat Sipil Dan Pengelolaan Zakat: Reposisi Laz Berdasarkan Uu Nomor 23 Tahun 2011.” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah* 2, no. 2 (2020): 94–116. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.149>.
- Rahman, Taufikur. “AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2015): 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>.
- Rapindo, Mentari Dwi Aristi, and Intan Putri Azhari. “Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Baznas Provinsi Riau.” *Economics, Accounting and Business Journal* 1, no. 1 (2021): 121–35.
- Sahroni, Oni, Mohammad Suharsono, Agus Setiawan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suprayogi, Bambang, and Abdur Razak. “Implementasi Pemasaran Digital Dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku Umkm Pamokolan Ciamis.” *Jurnal Produktif* 3, no. 2 (2019): 254–61.
- Surur, Achmad Tubagus, Hendri Hermawan Adinugraha, and Dliyauddin Achmad. “An Analysis of Sharia Economic Practices in Pekalongan from Habib Luthfi’s Perspective.” *ElSuffah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2025): 138–70. <https://doi.org/10.70742/suffah.v2i2.430>.
- Taut. “KEJAR TARGET PENGHIMPUNAN DAN TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN DI SEMARANG, LAZISMU GELAR RAKORDA.” Lazismu, 2025.
- Wulansari, Fatimah Purnama. “Good Zakat Governance: Adaptasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Lembaga Zakat.” *ZISWAF ASFA Journal* 2, no. 2 (2024): 181–95.